

**ANALISIS SIKAP SISWA SMA SEBAGAI PEMILIH
PEMULA DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN
DAN LEGISLATIF 2019**

SKRIPSI

Oleh

M Hanafia

NIM 06051381520052

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2020

**ANALISIS SIKAP SISWA SMA SEBAGAI PEMILIH PEMULA
DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN LEGISLATIF
2019**

SKRIPSI

Oleh

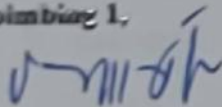
M Hanafia

Nomor Induk Mahasiswa 06051381520052

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

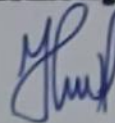
Megeesahkan :

Pembimbing 1,



Dra. Hj. Umi Chotimah, M.Pd., Ph.D
NIP. 196312211989112001

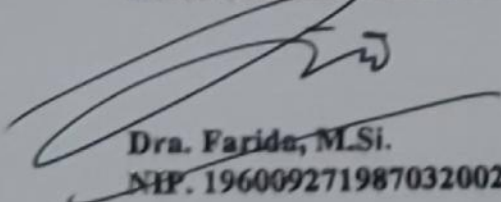
Pembimbing 2,



Kurnisar, S.Pd., M.H
NIP. 197603052002121011

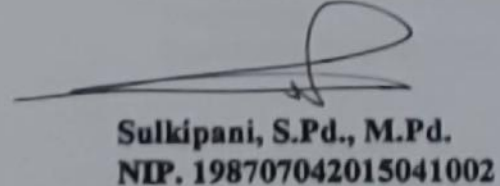
Mengetahui :

Ketuz Jurusan Pendidikan IPS,



Dra. Farida, M.Si.
NIP. 196009271987032002

Koordinatator Program Studi,



Sulkipani, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198707042015041002

**ANALISIS SIKAP SISWA SMA SEBAGAI PEMILIH PEMULA
DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN LEGISLATIF
2019**

Oleh

M Haanfa

Nomor Induk Mahasiswa 06051381520052

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

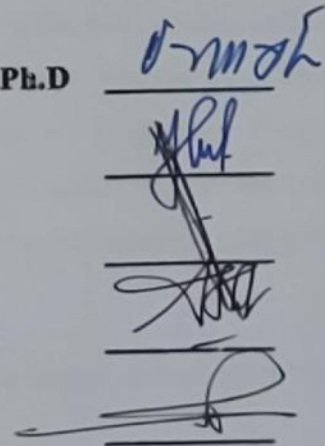
Telah diujikan dan lulus pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 23 Februari 2020

TIM PENGUJI

1. Ketua : Dra. Hj. Umi Chotimah, M.Pd., Ph.D
2. Sekretaris : Kurnisar, S.Pd., M.H
3. Anggota : Drs. Emil El Faisal, M.Si
4. Anggota : Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si
5. Anggota : Sulkipani, S.Pd. M.Pd



Indralaya, Maret 2020
Mengetahui
Koordinator Program Studi



Sulkipani, S.Pd., M.Pd
NIP.198707042015041002

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M Hanafia

NIM : 06051381520052

Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul “Analisis Sikap Siswa SMA Sebagai Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Legislatif 2019” ini beserta seluruhnya adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari ada pelanggaran yang ditemukan dalam Skripsi atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, Maret 2020

Yang membuat pernyataan,



M Hanafia

NIM. 06051381520052

PRAKATA

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya.

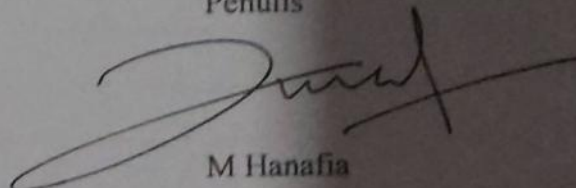
Penulis mengucapkan terimakasih kepada Ibu Dra. Hj. Umi Chotimah, M.Pd., Ph.D, Bapak Kurnisar, S.Pd., M.H, dan Ibu Puspa Dianti, S.Pd., M.Pd sebagai pembimbing yang selalu memberikan pengarahan yang baik, serta memberikan saran dan nasehat kepada penulis dalam penulisan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Prof. Soefendi, M.A., Ph.D., selaku dekan FKIP Unsri, Dr. Farida, M.Si., selaku ketua jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Sulkipani S.Pd., M.Pd, selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah banyak membantu serta memudahkan dalam pengurusan administrasi penelitian skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada seluruh dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yaitu Ibu Dra. Hj. Umi Chotimah, M.Pd., Ph.D, Bapak Drs. Emil El Faisal, M.Si, Ibu Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si, Bapak Kurnisar, S.Pd., M.H, Ibu Husnul Fatihah, S.Pd., M.Pd, Bapak Edwin Nurdiansyah, S.Pd., M.Pd, dan Ibu Puspa Dianti, S.Pd., M.Pd atas segala ilmu, pengetahuan serta nasehat yang telah diberikan, semoga dapat penulis amalkan.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk pembelajaran bidang studi PPKn dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Indralaya, Maret 2019

Penulis



M Hanafia

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	-
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR BAGAN.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	8
2.1. BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Sikap.....	9
2.1.1 Sikap Siswa.....	10
2.1.2 Pemilihan Umum.....	11
2.2. Pemilih Pemula.....	12
2.2.1 Demokrasi.....	13
2.2.2 Pendidikan Politik.....	14
2.2.3 Perilaku Pemilih.....	15
2.3. Partisipasi Politik.....	17
2.3.1 Generasi Dalam Pemilihan	19

2.4.	Kerangka Berpikir	20
2.5.	Alur Penelitian	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		22
3.1.	Variabel Penelitian.....	22
3.2.	Definisi Operasional Variabel Penelitian	22
3.3.	Populasi dan Sampel.....	25
3.3.1	Populasi	25
3.3.2	Sampel	25
3.4	Teknik Pengumpulan Data	27
3.4.1	Teknik Dokumentasi.....	27
3.4.2	Teknik Wawancara	27
3.4.3	Teknik Observasi	28
3.5	Uji Keabsahan Data	29
3.5.1	Uji Kredibilitas	30
3.5.2	Uji Transferabilitas	32
3.5.3	Uji Dependabilitas	32
3.5.4	Uji Konfirmabilitas	33
3.6	Teknik Analisis Data	33
3.6.1	Reduksi Data.....	34
3.6.2	Penyajian Data	34
3.6.3	Penarikan Kesimpulan	34
BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		35
4.1.	Hasil Penelitian	35
4.1.1	Deskripsi Data Hasil Penelitian	36
4.1.1.1	Deskripsi Data Hasil Dokumentasi.....	36
4.1.1.2	Deskripsi Data Hasil Wawancara	38
4.1.1.3	Deskripsi Data Hasil Observasi	71
4.2	Analisis Data Hasil Penelitian.....	72
4.2.1	Analisis Data Hasil Dokumentasi	72
4.2.2	Analisis Data Hasil Wawancara.....	73

4.2.3 Analisis Data Hasil Observasi.....	81
4.3 Pembahasan.....	82
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	84
5.1 Simpulan	84
5.2 Saran.....	85
5.2.1 Bagi Guru.....	85
5.2.2 Bagi Sekolah.....	85
5.2.3 Bagi Peneliti.....	86
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel.....	23
Tabel 3.2 Data Sekolah SMAN 1 Indralaya Utara.....	25
Tabel 3.3 Sampel.....	26
Tabel 3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	29
Tabel 4.1 Jadwal Kegiatan Penelitian	36
Tabel 4.2 Jumlah Identitas Siswa/Siswi SMAN 1 Indralaya Utara	38
Tabel 4.3 Deskripsi Data Hasil Wawancara	53
Tabel 4.4 Rekapitulasi Data Hasil Wawancara.....	75

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 2.1 Kerangka Berpikir.....	20
Bagan 2.2 Alur Penelitian	21

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Usul Judul Pembimbing 1
- Lampiran 2 : Usul Judul Pembimbing 2
- Lampiran 3 : Persetujuan Judul oleh Koordinator Koordinator Program Studi
- Lampiran 4 : Perubahan Judul Skripsi
- Lampiran 5 : Ketersediaan Pembimbing 1
- Lampiran 6 : Ketersediaan Pembimbing 2
- Lampiran 7 : Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 8 : Persetujuan Seminar Usul Penelitian
- Lampiran 9 : Perbaikan Seminar Usul Penelitian
- Lampiran 10 : Telah dilaksanakan Seminar Usul Penelitian
- Lampiran 11 : Surat Keputusan Izin Penelitian
- Lampiran 12 : Surat Setelah Melaksanakan Penelitian
- Lampiran 13 : Persetujuan Seminar Hasil Penelitian
- Lampiran 14 : Perbaikan Seminar Hasil Penelitian
- Lampiran 15 : Telah dilaksanakan Seminar Hasil Penelitian
- Lampiran 16 : Surat Persetujuan Ujian Skripsi
- Lampiran 17 : Kartu Pembimbing
- Lampiran 18 : Kisi-kisi Wawancara
- Lampiran 19 : Lembar Wawancara
- Lampiran 20 : Kisi-kisi Observasi
- Lampiran 21 : Lembar Observasi
- Lampiran 22 : Hasil Dokumentasi
- Lampiran 23 : Hasil Pemeriksaan Plagiat

**ANALISIS SIKAP SISWA SMA SEBAGAI PEMILIH PEMULA DALAM
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN LEGISLATIF 2019**

Oleh

M Hanafia

Nomor Induk Mahasiswa 06051381520052

Pembimbing: (1) Dra. Hj. Umi Chotimah, M.Pd., Ph.D

(2) Kurnisar, S.Pd., M.H

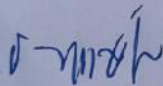
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sikap siswa SMA sebagai pemilih pemula dalam pemilihan umum presiden dan legislatif 2019. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini berjumlah 8 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi uji kredibilitas, uji transferabilitas, uji dependabilitas dan uji konfirmasi. Teknik analisis data digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penganalisisan pemilihan umum bagi pemula dapat dilihat dan di ukur melalui sikap siswa terhadap pemilihan umum presiden dan legislatif 2019.

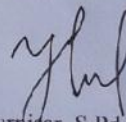
Kata-kata kunci : Sikap Siswa Pemilih Pemula, Pemilihan Umum, Siswa SMAN 1 Indralaya Utara

Pembimbing 1,



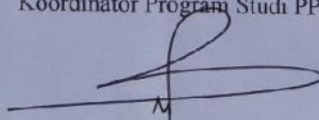
Dra. Hj. Umi Chotimah, M.Pd., Ph.D
NIP. 19631221989112001

Pembimbing 2,



Kurnisar, S.Pd., M.H
NIP. 197603052002121011

Mengetahui,
Koordinator Program Studi PPKn



Sulkipani, S.Pd., M.Pd
NIP. 198707042015041002

**Analysis of The Attitudes of High School Students as First-time Voters in
The 2019 Presidential and Legislative Elections.**

By

M Hanafia

Student ID Number: 06051381520052

Advisors: (1) Dra Hj. Umi Chotimah, M.Pd., Ph.D

(2) Kurnisar S.Pd., M.H

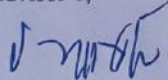
Pancasila and Civic Education Study Program

ABSTRACT

This research aims to know the Analysis of the attitudes of high school students as first time voters in the 2019 presidential and legislative elections. The study uses a descriptive method with a qualitative approach. The informant in this study amounted to 8 people. The data collection techniques used are documentation, interviews and observations. The validity tests of the data used include credibility testing, transferability test, dependability Test and confirmability test. Data analysis techniques used are data reduction, data presentation and withdrawal of conclusions. Based on the results of data analysis and previous discussion, it can be concluded that the strategy used by the that the analysis of general elections for novice voters can be seen measured through students attitudes towards the 2019 presidential and legislatif elections.

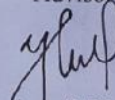
Key words: The Attitude of Beginner Voter Students, General Election, North Indralaya High School 1

Advisor 1,



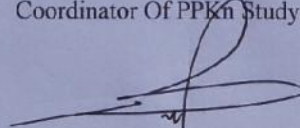
Dra Hj. Umi Chotimah, M.Pd., Ph.D
NIP. 19631221989112001

Advisor 2,



Kurnisar. S.Pd., M.H
NIP. 197603052002121011

Approve of
Coordinator Of PPKn Study Program



Sulkipani, S.Pd., M.Pd
NIP. 198707042015041002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menggunakan asas demokrasi yang selalu mengupayakan sesuatu pelaksanaan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Hal ini sesuai dengan bunyi sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Aulia, 2011:28) memberikan penekanan Indonesia sebagai negara demokrasi, yaitu “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Kedua landasan tersebut mengandung makna bahwa kekuasaan tertinggi negara berada di tangan rakyat.

Pelaksanaan kedaulatan rakyat, biasa diidentikkan dengan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu). Pertimbangan bahwa melalui proses pemilu, seluruh rakyat dapat ikut berpartisipasi dalam menentukan pemimpin dengan harapan demi kemajuan bangsa dan negaranya. Pemilu berbagai bentuk demokratisasi di Indonesia semakin nyata dengan adanya undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Secara umum pemilihan umum lahir dari konsep dan gagasan besar demokrasi yang berarti merujuk (Locke dan Rousseau, 1960:310) keterjaminan kebebasan keadilan dan kesetaraan bagi individu dalam segala bidang. Demokrasi terkandung nilai-nilai partisipatif dan kedaulatan yang dijunjung tinggi dan harus dijalankan oleh warga negara dan instrumen negara baik pada level legislatif, yudikatif maupun eksekutif. Hubungan antara warga negara dan negara meskipun masih berjarak namun dapat difasilitasi oleh berbagai lembaga dan elemen masyarakat karena adanya kebebasan bagi semua pihak untuk ikut serta secara

aktif dalam pembangunan nasional baik pembangunan politik maupun bidang-bidang lainnya. Masyarakat diberikan ruang untuk berperan aktif dan menjadi bagian dari proses demokrasi. Meskipun secara substansial, keikutsertaan mereka masih cenderung prosedural dan momentum.

Rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi memiliki hak sebagai warga negara untuk menyalurkan hak-hak politiknya melalui pemilu, peran dan partisipasi rakyat begitu juga siswa selaku pemilih pemula ini menjadi bukti bahwa nilai-nilai demokrasi masih berjalan dengan baik. Jika tidak ada pemilu maka rakyat tidak berdaulat, karena dengan pemilu, rakyat dapat menentukan siapa yang menjadi wakil-wakil dan pemimpinnya di kursi pemerintahan sehingga mereka dapat menjadi operator negara dalam menggapai harapan rakyat. Dalam pelaksanaannya, pemilu sangat bergantung pada pengadopsian sistem pemerintahan yang dianut oleh suatu negara, karena akan mempengaruhi model pelaksanaan kegiatan pemilu. Sistem pemerintahan yang dimaksud di sini adalah berkaitan dengan pengertian *regeringsdaad*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan oleh eksekutif dalam hubungannya dengan kekuasaan legislatif (Asshiddiqie, 2007:221).

Definisi tentang pemilu dengan memulai dari konsep demokrasi. *Demokrasi berarti pemerintahan rakyat*. Pemerintahan untuk rakyat dan oleh rakyat seluruhnya. Karenanya, sistem pemerintahan yang demokratis harus diatur sedemikian rupa sehingga rakyat seluruhnya turut serta dalam pemerintahan secara langsung atau tidak langsung. Pemilu adalah mekanisme dalam demokrasi tidak langsung untuk memilih wakil rakyat yang akan menjalankan pemerintahan, di mana para wakil rakyat tersebut menjalankan amanat pemerintahan berdasarkan mandat dari rakyat, oleh karena tidak memungkinkan seluruh rakyat terlibat secara langsung dalam pemerintahan.

Dalam manusia pasti memiliki hak yang sama untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum, dimana hak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dan secara lebih rinci dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang melekat dalam diri setiap orang sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati, dilindungi dan dijunjung tinggi baik oleh sesama manusia, pemerintah maupun oleh negara. Keberadaan hak asasi manusia ini bersifat melekat dan tidak dapat dicabut maupun dikurangi dari diri setiap orang oleh siapa-pun-dan-kapanpun.

Hak pilih dimiliki oleh setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan. Dalam sistem demokrasi, ikut serta dalam pemilihan umum merupakan hak politik bagi setiap warga negara. Hak ini menyangkut hak untuk menyelidiki, menjajaki alternatif yang ada dan hak untuk berpartisipasi dalam memutuskan siapa yang akan dipilih. Pemilihan umum merupakan bentuk murni dari penerapan demokrasi, walaupun demokrasi tidak bisa disamakan dengan pemilihan umum secara seutuhnya. Namun, pemilu bisa disebut salah satu aspek dari demokrasi. Oleh sebab itu, baiknya di negara yang menggunakan sistem perlu demokrasi maka perlu melakukan pelaksanaan pemilu yang periodik dalam memilih para penguasa atau wakil dari rakyat dalam bidang legislatif maupun eksekutif.

Konteks ini yang berkenaan dengan pemilihan umum bagi siswa sebagai masyarakat pemilih pemula dalam pemilihan presiden dan legislatif diharapkan dapat dijadikan dalam proses pembelajaran pendidikan politik untuk memahami kehidupan bernegara dan sebagaimana diketahui bahwa pemilihan umum merupakan proses pergantian pemimpin negara yang secara sah diakui oleh hukum, serta momentum bagi rakyat untuk secara langsung menentukan pasangan presiden, wakil presiden dan calon legislatif.

Pemilih dalam hal ini termasuk didalamnya para pemilih pemula seperti para siswa yang masih duduk di kursi pendidikan SMA yang biasanya menginjak usia 17 tahun ke atas, dan mahasiswa yang menginjak perguruan tinggi yang identik dengan umur 21 tahun yang masih memiliki jiwa nasionalisme dan paham

tentang politik yang benar dan politik yang salah sehingga disebut dengan *agen of change* atau lebih tepatnya disebut dengan pelaku perubahan.

Pemilih pemula masih di pengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu terutama oleh orang terdekat seperti anggota keluarga, mulai dari orang tua hingga kerabat sehingga pemilih pemula merupakan sasaran yang tepat dari partai politik dalam memperoleh suara ini kurangnya pendidikan politik yang mereka dapatkan.

Pada saat ini masih banyak permasalahan-permasalahan yang ada dalam hal berpolitik tentunya perlu pencerdesan melalui pendidikan politik bagi siswa sebagai pemilih pemula dalam politik dalam konteks ini dilihat dari pemilihan umum yang dilaksanakan oleh pemerintah. Bagi siswa keaburan atau tidak terlalu paham tentang pandangan politik yang menimbulkan aspek negatif sehingga menumbuhkan citra yang negatif pula. Misalnya masih adanya fenomena politik uang (*money politic*), serangan fajar dan lain sebagainya. Hal ini berarti aspek-aspek praktis dari sistem politik yang berlaku lebih berpengaruh dalam pembentukan persepsi kesadaran siswa tentang budaya politik yang kurang benar. Banyak negara berkembang pendidikan politik dan pendidikan demokrasi sering dianggap sebagai “*taken for granted or ignored*”, yakni dianggap akan terjadi dengan sendirinya (Gandal dan Finn dalam Winatapura, 2005:2). Pendidikan demokrasi sebaiknya ditempatkan sebagai bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan. Pendidikan demokrasi dapat dilakukan lewat dua jalur, yakni lewat pendidikan formal dan pendidikan non formal dalam masyarakat. Pendidikan politik berperan sebagai *maintance atau persistence*, untuk memelihara sebuah sistem politik (Almond, dalam Cholisin, 2000:63)

Dalam jalur pendidikan formal sebagaimana kita ketahui dan alami penanaman kesadaran politik dilakukan baik melalui kegiatan-kegiatan intra maupun ekstra kurikuler, sedangkan dalam jalur non formal dan informal proses tersebut berjalan melalui komunikasi sosail secara timbal balik, di lingkungan keluarga, organisasi-organisasi kemasyarakatan serta forum kemasyarakatan lainnya. Pemilih pemula sebagai target banyak partai untuk mengiring opini merka, karena secara psikologis sangat mudah diombang-ambingkan. Oleh karena itu, ketersediaan akses informasi pemilu yang bersifat netral sangat diperlukan

agar pemilih pemula ini benar-benar dapat menentukan aspirasi mereka secara murni, bukan karena digiring atau sebagainya. Mereka masih awam terkait dengan pengetahuan politik dan hakikat pemilu itu.

Tentunya dalam era ini peserta didik perlu penanaman keasadaran politik dalam konteks sekala pemula dengan melihat sejauh mana peran pendidikan politik dalam rangka menyadarkan sikap seseorang atau peserta didik dalam berpartisipasi politik. Pembelajaran berpolitik hanya sesaat, sehingga setelah perhelatan pemilihan umum selesai maka selesailah tugas mereka sebagai anggota masyarakat dalam berdemokrasi. Padahal pemahaman dan etika berdemokrasi sangat diperlukan sepanjang mereka sebagai warga negara dan generasi penerus bangsa untuk memajukan budaya politik yang terpuji.

Mengacu pada pemilu serentak 2019 tentu menjadi tantangan dan peluang bagi seluruh elemen bangsa termasuk juga para pemilih pemula dalam perbaikan sistem politik dan demokrasi di Indonesia. Agar pemilu serentak 2019 dapat terlaksana dengan baik diperlukan kesungguhan dari pemerintah dan anggota parlemen untuk tidak terjebak dalam permainan politik yang oportunistik dan pragmatis, penyelenggaraan pemilu serentak 2019 harus menjadi referensi sistem pemilu baru di Indonesia. Sebagai upaya melihat aspek-aspek apa yang perlu dilakukan dalam suksesi pelaksanaan pemilu serentak 2019. Agar lebih memperjelas mengenai pemilih pemula dalam pemilihan umum, di antara ini peneliti akan memaparkan penelitian mengenai pemilih pemula dalam pemilihan umum yang telah dilakukan para peneliti sebelumnya. Diawali oleh penelitian yang dilakukan oleh Rachmat dan Esther (2015) sebagai anggota praja di Institut Pemerintahan Dalam Negeri dengan judul “Perilaku Pemilih Pemula dalam Pilkada Serentak di Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang Tahun 2015” dengan kesimpulan bahwa dengan cara pendekatan sosiologis, psikologis, dan pilihan rasional mampu untuk melaksanakan pesta demokrasi dengan cara berperilaku baik, peran keluarga dalam sosiologis dan mampu memilih pilihan secara rasional.

Hasil dari studi lapangan berkenaan dengan pendidikan politik bagi siswa sebagai bagian masyarakat pemilih pemula dalam Pemilu bahwa diharapkan dapat dijadikan proses pembelajaran untuk memahami kehidupan bernegara. Pendidikan politik yang masih rendah membuat kelompok ini rentan dijadikan sasaran untuk dimobilisasi oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Bentuk partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilu yaitu pemberian suara, kampanye, dan berbicara masalah politik serta dalam studi pendahuluan ini ada 6 informan yang diwawancarai terkait pemilih pemula dalam pemilihan umum Tahun 2019 .

Faktor-faktor pendukung partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilu yaitu Pertama, berkenaan dengan penerimaan perangsang politik. Pemilih pemula terdorong untuk ikut berpartisipasi. Pemilihan Umum karena ada rangsangan dari media masa atau elektronik. kedua berkenaan dengan karakteristik sosial seseorang. Para pemilih pemula mempunyai karakteristik pribadi sosial yang berbeda-beda, namun dari berbagai macam perbedaan itu para pemilih pemula cukup banyak yang peduli dan sadar akan hak politik mereka sebagai masyarakat. Mereka mau berpartisipasi dalam pemilu dengan datang ke TPS dimana mereka tinggal sesuai dengan undangan yang mereka dapat. Ketiga, menyangkut sistem politik dan sistem partai tempat seorang individu itu hidup.

Para pemilih pemula mempunyai karakteristik pribadi sosial yang berbeda-beda, namun dari berbagai macam perbedaan itu para pemilih pemula cukup banyak yang peduli dan sadar akan hak politik mereka, peran mereka sebagai masyarakat. keempat ialah berupa perbedaan regional. Hampir setiap daerahnya aman dan kondusif, sehingga semua masyarakat dapat berpartisipasi dalam pemilu termasuk para pemilih pemula. Para pemilih pemula berpartisipasi dalam pemilu berdasarkan keinginan mereka sendiri, tidak adanya arahan dari pihak lain, tidak adanya suatu hal yang otoriter. Faktor-faktor penghambat partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilu yaitu adalah kesibukan kegiatan sehari-hari, perasaan tidak mampu, dan larangan dari pihak keluarga.

Merujuk pada beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu dapat disimpulkan bahwa sikap pemilih pemula dapat sangat berpengaruh dalam pemilihan umum presiden dan legislatif sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu berdasarkan berbagai pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti masalah ini dengan judul “Analisis sikap siswa SMA sebagai pemilih pemula dalam pemilihan Presiden dan Legislatif 2019”

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis paparkan maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sikap siswa SMA sebagai pemilih pemula dalam pemilihan umum Presiden dan Legislatif 2019?

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hasil analisis sikap siswa SMA sebagai pemilih pemula dalam pemilihan umum Presiden dan Legislatif 2019.

1.3 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.3.1 Manfaat secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk siswa mengenai pemilihan umum bagi pemula dan memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep, teori-teori terhadap kajian ilmu serta menjadi sumber wawasan dan pengetahuan untuk para pembaca berkaitan dengan analisis sikap siswa SMA sebagai pemilih pemula dalam pemilihan umum presiden dan legislatif 2019 dan semoga bisa menjadi rujukan untuk setiap para peneliti selanjutnya.

1.3.2 Manfaat secara praktis

1.3.2.1 Manfaat bagi Siswa

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi siswa mengenai analisis sikap siswa SMA sebagai pemilih pemula dalam pemilihan umum presiden dan legislatif 2019.

1.3.2.2 Manfaat bagi Peneliti

Menambah wawasan peneliti tentang analisis sikap siswa SMA sebagai pemilih pemula dalam pemilihan umum presiden dan legislatif 2019.

1.4.2.3 Manfaat bagi sekolah

Menambah dan memberikan pemahaman terhadap politik melalui sarana pendidikan di lingkungan sekolah secara khusus sebagai pemilih pemula dan masyarakat secara umum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sikap

Sikap manusia merupakan prediktor yang utama bagi perilaku (tindakan) sehari-hari, meskipun masih ada faktor-faktor lain, yakni lingkungan dan keyakinan seseorang. Hal ini berarti bahwa kadangkadang sikap dapat menentukan tindakan seseorang, tetapi kadangkadang sikap tidak mewujudkan menjadi tindakan. Pertimbangan akan segala dampak positif dan negatif suatu tindakan turut menentukan apakah sikap seseorang menjadi tindakan yang nyata ataukah tidak.

Karakteristik individu meliputi berbagai variabel seperti motif, nilai-nilai, sifat kepribadian, dan sikap yang saling berinteraksi satu sama lain dan kemudian berinteraksi pula dengan faktor-faktor lingkungan dalam menentukan perilaku. Kata lain di samping sikap, faktor utama lain yang mempengaruhi tindakan seseorang adalah norma sosial. Menurut *Theory of Reasoned Action* (Ajzen & Fishbein, (1980:444), di antara variabel sikap dan perilaku (tindakan) ada variabel yang mengantarainya yaitu maksud (disposisi). Seseorang yang akan melakukan suatu tindakan didasari oleh maksud tertentu. Teori ini menempatkan sikap di tempat yang sentral dalam kaitannya dengan tindakan manusia, sikap mereka dikatakan sebagai fungsi keyakinan. Seseorang yang yakin bahwa tindakan yang akan dilakukan menimbulkan dampak positif pada dirinya, ia akan bersikap cenderung melakukan tindakan tersebut. Demikian pula sebaliknya jika ia yakin tindakan yang akan dilakukan berdampak negatif pada dirinya, ia bersikap menolak melakukan tindakan tersebut. Hal ini disebut *behavior belief*.

Di samping keyakinan pribadi *behavior belief*, keyakinan kelompok (*group belief*) juga turut menentukan tindakan seseorang. Apabila orang tersebut yakin bahwa tindakannya itu akan disetujui oleh kelompoknya atau lingkungan sosialnya, maka dia akan melakukannya. Sebaliknya jika ia yakin bahwa lingkungan sosialnya tidak akan mendukungnya maka ia tidak bermaksud melakukan tindakan tersebut. Menyadari akan sikap kompleks seperti yang diuraikan di atas, perlu dipikirkan bahwa hal-hal sikap perlu untuk diajarkan sehingga sifat tersebut dapat berubah dan dengan sikap tersebut dapat diukur mengenai sikap pemilih pemula dan pemilu.

2.1.1 Sikap Siswa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, menjelaskan bahwa siswa adalah “anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Artinya, tidak ada dua individu yang sama. walaupun secara fisik mungkin individu memiliki kemiripan, tetapi pada hakikatnya mereka tidaklah sama, baik bakat, minat, kemampuan dan sebagainya. disamping itu, setiap individu juga adalah makhluk yang sedang berkembang.

Hamalik (2001:99), Murid adalah “Salah satu komponen pengajaran, disamping faktor guru, tujuan dan metode pengajaran sebagai salah satu komponen yang terpenting diantara komponen lainnya.” Pada dasarnya “ia” adalah unsur penentu dalam proses mengajar. Tanpa adanya murid, sesungguhnya tidak akan terjadi proses pengajaran.

Berdasarkan pengertian di atas, siswa adalah komponen terpenting selain guru dalam suatu proses kegiatan belajar mengajar (KBM) disekolah. Sedangkan Pengertian dari Persepsi Siswa adalah sebagai pandangan atau tanggapan siswa terhadap objek tertentu melalui panca indera berdasarkan faktor pengalaman dan pengetahuan sendiri.

Proses belajar mengajar di sekolah menempatkan siswa sebagai komponen yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan. Siswa adalah subyek sekaligus objek dalam proses belajar mengajar, sebab siswalah yang melakukan belajar dan siswa pula yang menjadi tujuan belajar. Proses belajar diharapkan siswa mengalami perubahan pengetahuan, nilai, sikap dan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Abdurahman (2009:51) mengatakan: “anak didik adalah unsur manusiawi yang penting dalam kegiatan interaksi edukatif. Ia dijadikan sebagai pokok persoalan dalam semua gerak kegiatan pendidikan dan pengajaran”. Berarti siswa menduduki posisi yang menentukan kelangsungan proses belajar serta pencapaian tujuan belajar.

2.1.2 Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan bentuk konkret dari demokrasi prosedural, walau demikian demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum secara harfiah, namun pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat mendasar yang juga perlu dilakukan secara demokratis. Oleh hal itu, biasanya di negara-negara yang menanamkan diri sebagai negara demokrasi membiasakan untuk melakukan pemilihan umum untuk memilih pejabat-pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif dari tingkat teratas sampai terendah. Demokrasi dan pemilu yang demokratis saling merupakan “*qonditio sine qua non*”, *the one can not exist withou the others*.

Demokrasi dan proses demokratisasi secara kualitatif substansial tidak cukup hanya dengan dipenuhinya atribut-atribut formal demokras, seperti adanya lembaga perwakilan, adanya lebih dari satu partai politik yang bersaing dalam pemilu, dan adanya pemilu yang periodik (Mukhthie,1997:73). Demokrasi dan proses demokratisasi harus didasarkan pada standard-standard hak asasi manusia (HAM) agar lebih bermakna partisipatoris dan emansipatoris, sebab kalau tidak, demokrasi akan mudah dikooptasi dan diselewengkan.

Seluruh demokrasi yang terbaru akan melakukan pemilihan, tetapi tidak semua pemilihan adalah demokratis, karena pemilihan yang demokratis bukan

sekedar bentuk, tetapi pemilihan yang demokratis harus jujur, memiliki waktu yang tetap, luas dan definitif menentukan pemimpin.

Ukuran bahwa suatu pemilu demokratis atau tidak harus memenuhi tiga syarat (Merloe, 1994), yaitu a) ada tidaknya pengakuan, perlindungan, dan pemupukan HAM b) terbangunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemilu yang menghasilkan pemerintahan yang *legitimate*, dan c) terdapat persaingan yang adil dari para peserta pemilihan umum.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung untuk pertama kali diadakan pada tanggal 6 Juli 2004 sesudah selesainya pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD (selanjutnya disebut pemilu legislatif) tahun 2004 dan untuk kedua kalinya dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2009 juga setelah selesainya pemilu legislatif tahun 2009.

Berdasarkan uraian mengenai pemilu di atas dapat disimpulkan mengenai pemilihan umum ialah salah satu cara atau sarana untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan pemerintahan adalah dengan melaksanakan pemilu. Pemilihan umum adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai Kepala Desa.

2.2 Pemilih Pemula

Pemilih pemula di Indonesia terbagi atas tiga kategori. Pertama pemilih yang rasional yakni pemilih yang benar benar memilih partai berdasarkan penilaian dan analisis mendalam. Kedua, pemilih kritis emosional, yakni pemilih yang masih idealis dan tidak kenal kompromi. Ketiga, pemilih pemula, yakni pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia mereka baru memasuki usia pemilih. Pasal I ayat (22) UU No. 10 Tahun 2008 menjelaskan bahwa pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (Tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/belum kawin. Kemudian pasal 19 ayat (1 dan 2) UU No. 10

Tahun 2008 menerangkan bahwa pemilih yang mempunyai hak memilih adalah warga negara Indonesia yang terdaftar oleh penyelenggara pilkada dalam daftar pemilih dan pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (Tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah pernah kawin. (Nuansa Aulia, 2011:2)

Merujuk dari beberapa definisi pemilih pemula dapat penulis simpulan bahwa pemilih pemula adalah warga-negara yang di daftar oleh penyelenggara pilkada dalam daftar pilkada. Baru mengikuti pilkada (memberikan suara) pertama kali sejak pilkada yang diselenggarakan di Indonesia dengan rentang usia 17-21 tahun. Kelompok pemilih pemula ini biasanya mereka yang berstatus mahasiswa serta pekerja muda. Pemilih pemula dalam ritual demokrasi (pilkada) selama ini sebagai objek dalam kegiatan politik yaitu mereka yang masih memerlukan pembinaan dan pengembangan kearah pertumbuhan potensi dan kemampuannya ke tingkat yang lebih optimal agar dapat berperan dalam bidang politik. Kelompok pemilih pemula ini biasanya mereka yang berstatus mahasiswa serta pekerja muda. Pemilih pemula Dalam ritual demokrasi (pemilu) selama ini sebagai objek dalam kegiatan politik, yaitu mereka yang masih memerlukan pembinaan dan pengembangan kearah pertumbuhan potensi dan kemampuannya ke tingkat yang lebih optimal agar dapat berperan dalam bidang politik. Dari definisi di atas bahwa ciri-ciri pemilih pemula yaitu (undang-undang Republik Indonesia No 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum) :

1. Warga negara Indonesia dan pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 tahun atau lebih atau sudah pernah kawin.
2. Baru mengikuti pilkada (memberikan suara) pertama kali sejak pemilu yang diselenggarakan di Indonesia dengan rentang usia 17-21 tahun.
3. Mempunyai hak memilih dalam penyelenggaraan Pemilu 2019.

Sehingga dalam bidang politik dalam hal ini demokrasi yang dibalut dalam pemilihan umum presiden dan pemilihan legislatif tahun 2019 setiap orang berhak untuk melaksanakan proses pemilihan umum dengan sesuai undang-undang diatas yang dalam hal ini menjadikan ciri-ciri untuk pemilih pemula.

2.2.1 Demokrasi

Ide demokrasi ini erat kaitannya dengan pengembangan *civil society* di Indonesia, khususnya dalam rangka perluasan fungsi dan optimalisasi peran aktif warga negara yang harus dilakukan dengan cerdas dan baik dalam membangun masyarakat yang benar-benar demokratis sesuai dengan konteks negaranya maka tidak dapat dipungkiri pentingnya pendidikan politik khususnya mengenai pendidikan demokrasi bagi warga negara.

Implikasi dari pandangan tersebut maka diperlukan pendidikan yang baik yang memungkinkan warga negara mengerti, menghargai kesempatan dan tanggung jawabnya sebagai warga negara yang demokratis. Pendidikan tersebut menurut Gandal dan Finn (1999:3) pendidikan yang bukan hanya sekedar memberikan pengetahuan dan praktik demokrasi, akan tetapi juga menghasilkan warga negara yang berpendirian teguh, mandiri, memiliki sikap selalu ingin tahu dan berpandangan jauh ke depan (futuristik). Namun, hal tersebut bukan berarti pendidikan demokrasi sebagai mata pelajaran yang terisolasi, akan tetapi harus dikaitkan dengan pelajaran lainnya.

Berkenaan tentang definisi demokrasi yang telah penulis Gandal dan Finn (1999: 45) perlu dikembangkan model *school-based democracy education*. Model tersebut, antara lain Perhatian cermat diberikan kepada *the root and branches of the democratic idea*, atau landasan dalam bentuk-bentuk demokrasi, adanya kurikulum yang memungkinkan siswa dapat mengeksplorasi sejarah demokrasi di negaranya untuk dapat menjawab persoalan apakah kekuatan dan kelemahan demokrasi yang diterapkan di negaranya dalam beberapa kurun waktu tersedianya kesempatan bagi siswa untuk memahami kondisi demokrasi yang diterapkan di negara-negara di dunia sehingga para siswa memiliki wawasan yang luas tentang aneka ragam sistem sosial demokrasi dalam berbagai konteks.

Prakondisi yang harus diciptakan untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis adalah melibatkan peran serta masyarakat dalam kehidupan demokrasi

tersebut. Untuk itu, peran pendidikan demokrasi sangat penting untuk mencapai kondisi ideal kehidupan demokrasi tersebut.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kondisi pemilih pemula dalam proses demokrasi pemilihan umum sangat lah dibutuhkan untuk mewujudkan sikap peduli pemula dalam pemilihan umum presiden dan legislatif 2019.

2.2.2 Pendidikan Politik

Inti pendidikan politik ialah pemahaman aspek-aspek politik dari setiap permasalahan. Dan pemahaman politik berarti pemahaman konflik. Banyaknya konflik di masyarakat manusia itu disebabkan oleh adanya kontroversi, perbedaan, aneka ragam fikiran dan tindakan/perilaku manusia dalam masyarakat. Juga disebabkan olehnya ada persamaan keinginan dan tingkah laku, sehingga memunculkan persaingan, kompetisi, konkurensi dan konflik. Oleh karena itu hidup bermasyarakat itu adalah hidup di tengah banyak dimensi konflik dan ketegangan. Politik merupakan perbuatan yang berkaitan dengan perjuangan kolektif dengan segenap kebijakannya untuk mencapai tujuan-tujuan kolektif tertentu dengan proses mempengaruhi individu agar dia memperoleh informasi lebih lengkap, wawasan lebih jernih, dan keterampilan politik yang lebih obyektif lingkungan sekitarnya, terutama kondisi politik yang mengitari dirinya (Parson, 2015:15)

Dengan demikian pendidikan politik mendorong peserta didik untuk lebih a; Mampu memahami situasi sosial politik penuh konflik b; berani bersikap tegas memberikan kritik membangun terhadap kondisi masyarakat yang tidak mantap c; aktivitasnya diarahkan pada proses demokratisasi individu/ perorangan, dan demokratis semua lembaga kemasyarakatan serta lembaga negara d; sanggup memperjuangkan kepentingan dan ideologi tertentu, khususnya yang berkolerasi dengan keamanan dan kesajahteraan hidup bersama (Kartono, 1996: 169).

Keempat hal tersebut apabila aktivitas-aktivitas tersebut di atas dicekal atau dilarang, pasti pendidikan politik akan menjadi pendidikan politik yang semu, pada hakekatnya adalah identik dengan dengan omong kosong besar dan dusta akbar. Pendidikan politik bukan hanya pemahaman peristiwa-peristiwa politik dan konflik yang diutamakan, akan tetapi orang justru menekankan aktivitas politik secara sadar dan benar sesuai dengan azas-azas demokrasi sejati. Politik itu bukan monopoli para pemimpin, kaum berduit dll. Akan tetapi milik bersama (Kartono, 1996: 157)

Inti dari pendidikan politik adalah untuk memberikan pengetahuan kepada pemilih pemula dalam hal ini adalah siswa yang pemahamannya lebih mengenai ke aspek-aspek politik dari setiap permasalahan.

2.2.3 Perilaku Pemilih

Perilaku pemilih merupakan tingkah laku seseorang dalam menentukan pilihannya yang dirasa paling disukai atau paling cocok. Terdapat beberapa daerah wilayah yang merupakan kumpulan komunitas masyarakat yang terbentuk atas dasar sistem kekerabatan dan paguyuban berdasarkan keturunan yang menjadi pemuka masyarakat tersebut berasal dari keluarga atau kerabat asli keturunan dari orang yang dipandang terkemuka dari segi sosial ekonomi atau terkemuka karena ketokohnya sehingga warga masyarakat seringkali menyandarkan diri dan sikapnya terhadap pemuka/tokoh masyarakat tersebut. Sikap ini mencerminkan adanya dominasi ketokohan yang berperan untuk menentukan sikap dan perilaku serta orientasi warga bergantung pada pemuka tersebut.

Kecenderungan untuk melakukan perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam berbagai kehidupan sosial ekonomi, sosial politik maupun sosial budaya terbatas pada adanya sistem ide atau gagasan dari pemuka masyarakat untuk memodifikasi sistem sosial dan sistem budaya yang sudah mapan dalam kehidupan masyarakat disesuaikan dengan kondisi dan dinamika masyarakat Faktor ini menjadi kendala bagi kandidat atau calon legislatif untuk

menerobos masuk ke dalam komunitas masyarakat tersebut dalam rangka sosialisasi atau sekedar silaturahmi. Jika calon Legislatif berhasil masuk ke dalam komunitas masyarakat tersebut, hanya sebatas etika pergaulan masyarakat yaitu menerima setiap tamu yang bersilaturahmi tetapi tidak akan mengikuti apa yang diinginkan oleh kandidat/calon legislatif yang bersangkutan.

Komunitas masyarakat yang heterogen cenderung lebih bersifat rasional, pragmatis, tidak mudah untuk dipengaruhi, terkadang memiliki sikap ambivalen, berorientasi ke materi. Sikap dan pandangan untuk memilih atau tidak memilih dalam proses politik lebih besar, sehingga tingkat kesadaran dan partisipasi politiknya ditentukan oleh sikap dan pandangan individu yang bersangkutan, tidak mudah untuk dipengaruhi oleh tokoh atau ikatan primordialisme tertentu. Ada berbagai cara untuk mengukur konsep “kewajiban warga” dalam konteks ikut serta dalam pemilu atau pilpres mengenai perilaku memilih misalnya, hal itu ditunjukkan dengan adanya persepsi merasa bersalah kalau tidak ikut memilih (Kartono, 1996: 7)

Perilaku pemilih pemula dijadikan sebagai acuan tingkah laku peserta didik untuk menentukan pilihannya dapat disimpulkan bahwa perilaku berpolitik ini jangan hanya berkembang di kota-kota besar melainkan juga pada tingkatan siswa sebagai pemilih pemula. Bila ini terjadi kita akan mengalami ketimpangan dalam perilaku memilih atau kesadaran berpolitik sehingga akan menimbulkan gejala sosial.

2.3 Partisipasi Politik

Partisipasi politik pada dasarnya hal ini adalah rangkaian yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia dalam rangkaian proses aturan untuk pemumutan suara untuk tujuan memrubah yang di lakukan pemerintah. Secara etimologi kata partisipasi berasal dari kata latin “Pars” dan “capere”. “Pars”, berarti pengalangan dan capere berarti, ikutserta. Maka dapat diartikan partisipasi adalah “ikut serta mengambil bagian”. selanjutnya dalam bahasa lain (inggris), disebut *participate* atau *participation* berarti mengambil keping atau mengambil fungsi.

Menurut Miriam Budiardjo (2008: 367), sebagai pengertian mendasar dapat disebut bahwa ikut serta politik ialah proses warga negara masyarakat atau sekelompok warga demi terlibat berpesta demokrasi baik secara penuh dan peduli mulai kepedulian pemilihan umum, seperti halnya dengan cara memilih kepala negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah *public policy*. Proses ini memiliki aktivitas seperti membagi suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan *contacting* atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai, atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*nya dan sebagainya.

Kepedulian politik bisa ditafsirkan merupakan rancangan sebagian warga untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Aktivitas ini bisa berbentuk mencari pemimpin negara atau merubah peraturan publik. Menurut Ramlan Surbakti partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi kehidupannya. Partisipasi politik dapat diartikan sebagian kegiatan sekelompok orang untuk ikut dalam kegiatan politik. Kegiatan ini dapat berupa memilih kepala daerah atau mempengaruhi kebijakan pemerintah. (Ramlan, 2007:150) dalam partisipasi politik di negara berkembang, partisipasi politik adalah kegiatan warga negara preman (*private citizen*), yang bermaksud mempengaruhi keputusan pemerintah.

Fakta tersebut juga mengandung arti bahwa semakin kuat perasaan wajib memilih pada seseorang, semakin kuat pula kecenderungan untuk ikut memilih. Ini berarti bahwa menurunnya tingkat partisipasi dalam pemilu dan pilpres disebabkan oleh menurunnya perasaan wajib untuk ikut pemilu atau pilpres tersebut di masyarakat.

2.3.1. Generasi muda dalam pemilihan

Menurut Poerwadarminta(1976: 314), generasi dapat dijelaskan oleh waktu orang-orang tersebut. Sedangkan kata “Muda”menurut beliau ialah belum

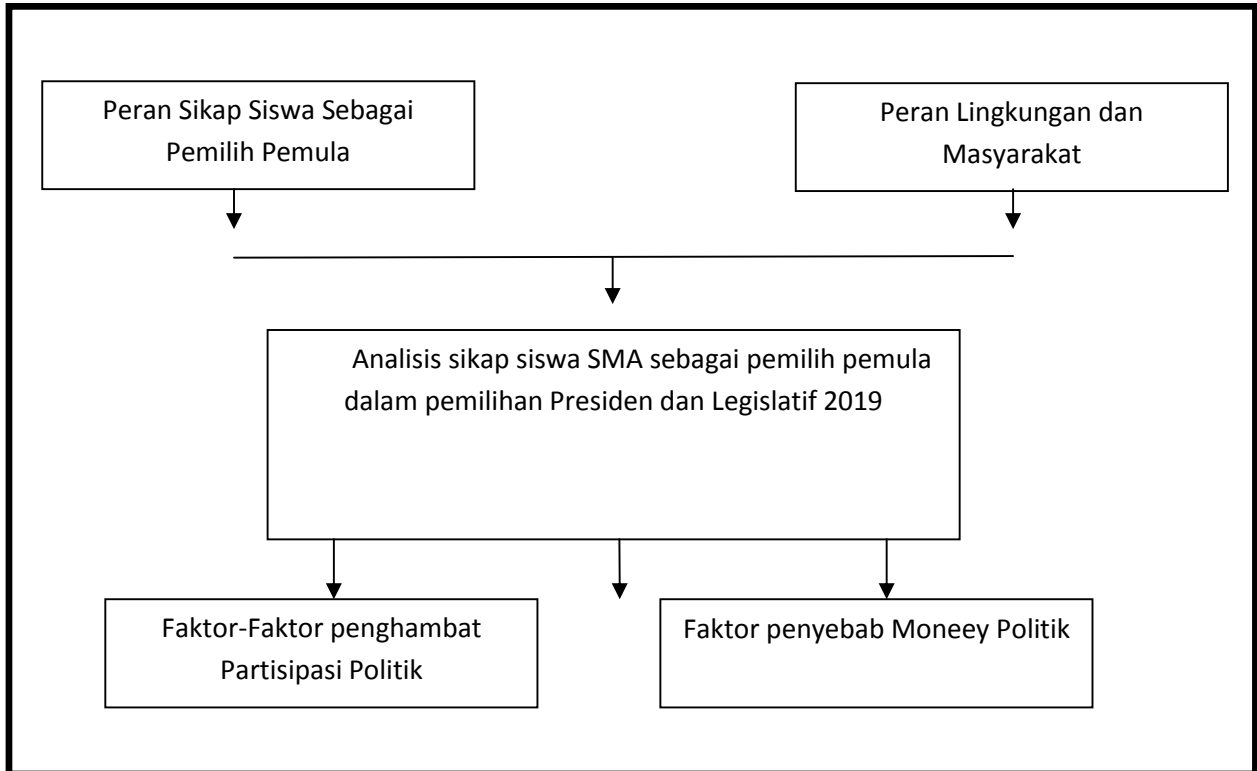
sampai setengah umur, atau masih-muda. Pandangan umum tentang politik terhadap siswa dapat dipahami, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Kita melihat betapa perlunya menyosialisasikan kesadaran politik bagi siswa ke dalam nilai-nilai, norma-norma dan kebiasaan-kebiasaan dasar dalam kehidupan kemasyarakatan, dimana kehidupan politik merupakan salah satu seginya, dan karena tujuan yang demikian itu adalah juga merupakan tujuan dari pendidikan, baik formal maupun informal. Tingkat kesadaran pemilih pemula.

2.6. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan kerangka usulan analisis, dibuat dengan menghubungkan beberapa variabel dari studi pustaka. Kerangka ini menunjukkan keterkaitan antar variabel yang dijelaskan dalam studi pustaka menganalisis sikap siswa SMA sebagai pemilih pemula dalam pemilihan Presiden dan Legislatif 2019

Maka dengan hal ini dapat disimpulkan mengenai peserta didik sebagai pemilih pemula dalam berdemokrasi merupakan suatu hal yang perlu dalam memberikan asupan kepada peserta didik guna untuk dalam berpartisipasi dalam hal politik pemilih pemula, tentunya dari hal ini di lihat seberapa jauh tingkat kesadaran peserta didik terhadap politik. Penelitian ini memiliki maksud ingin menganalisis sikap siswa SMA sebagai pemilih pemula dalam pemilihan Presiden dan Legislatif 2019. Kerangka berfikir secara umum disampaikan dalam bagian bagan bersisi tentang suatu rancangan yang disusun peneliti guna menggambarkan konsep umum terkait apa saja yang akan membuat permasalahan dalam penelitian dapat terpecahkan. Menurut Uma Sekaran (dalam Sugiono 2016: 60) “Kerangka berfikir merupakan model konseptual mengenai bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting”. Adapun kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Kerangka Berpikir

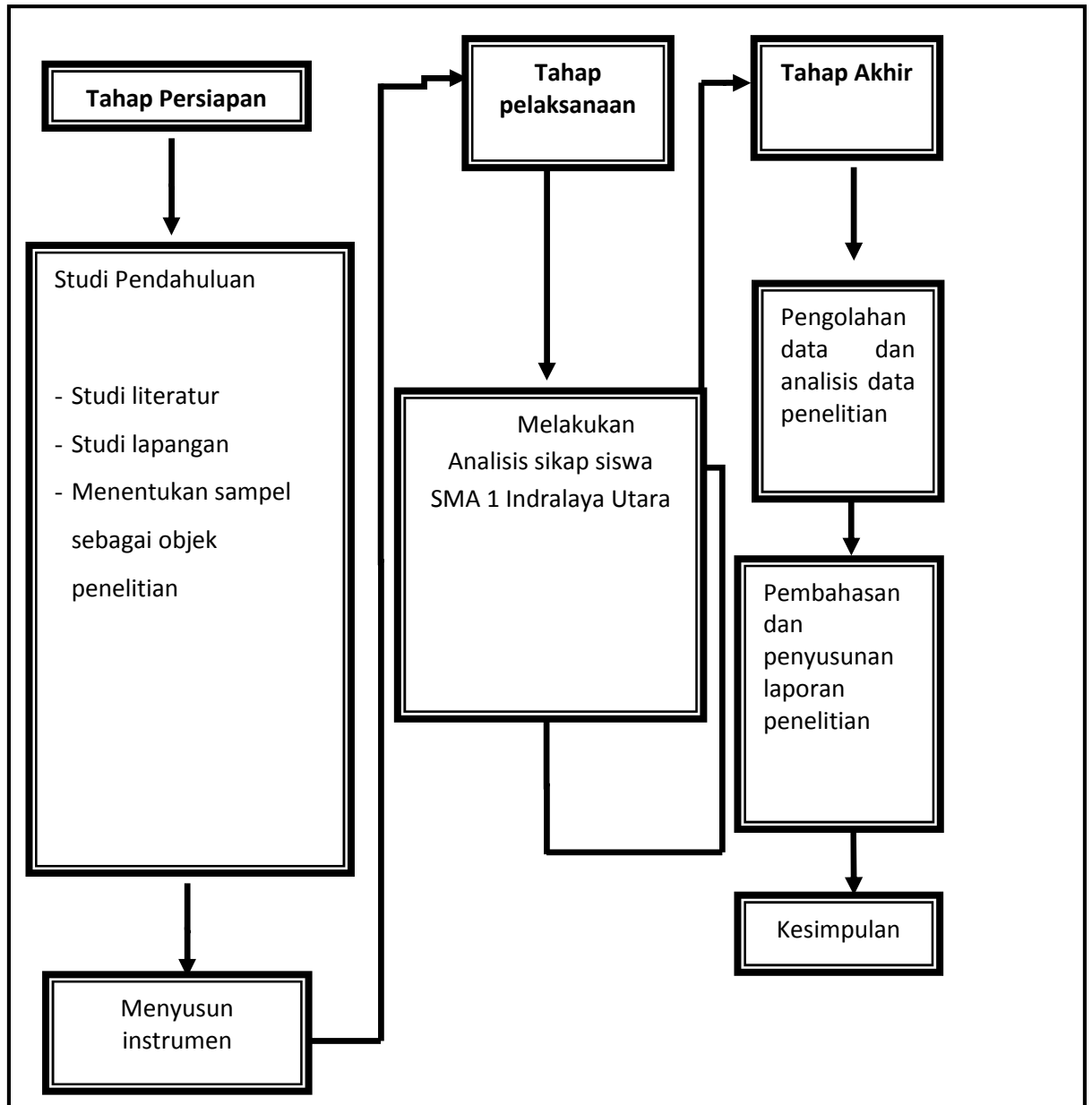


Sumber: Data primer diolah, tahun 2018

Bagan: 2.1 Kerangka Berfikir

2.5 Alur Penelitian

Berdasarkan kerangka berfikir di atas, maka alur penelitian yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Sumber: Data primer diolah, tahun 2018

Bagan: 2.2 Alur Penelitian

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pemilihan Umum*. Jakarta
- Ajzen (1980). *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*. Celeban Timur Yogyakarta
- Asshiddiqie, 2015. *Pendidikan Politik sebagai bagian dari Pendidikan orang Dewasa: Mandar Maju*
- Almond, Cholisin, 1984, *Budaya Politik Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*. Bina Aksara, Jakarta
- Kartini Kartono, 2015. *Pendidikan Politik sebagai bagian dari Pendidikan orang dewasa: Mandar Maju*.
- Dosen Pendidikan Kewarganegaraan dan perbandingan sistem pemerintahan pada program studi pendidikan kewarganegaraan FISIP UNY, *Pendidikan Politik dan politik pendidikan, (artikel dalam jurnal dengan nomor dan satu pengarang)*
- Emzir. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta Utara: Rajagrafindo Persada
- Hardiman, 2013. *Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu & Demokrasi*. Malang : Setara Press
- Basuki Rachamat dan Esther. 2015. *Perilaku Pemilih Pemula dalam Pilkada Serentak*. Ciomas Kabupaten Serang
- Moleong, J Lexy. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Miriam, 1981. *Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta : PT Gramedia
- Noor, Cholis. 2016. *Pendidikan Politik*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Parson, 2015. *Pendidikan Politik sebagai bagian dari Pendidikan orang dewasa: Mandar Maju*.
- Ramlan, 1922, *Memahami Ilmu Politik*. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta

Sarosa, Samiaji, 2012. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*. Jakarta Barat: Indeks

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta

Soemantri, Saragih. 2013. *Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu & Demokrasi*. Malang :
Setara Press

Tana' Ranggina Sarongallo, Ombak. 2004. *Berdemokrasi*. Yogyakarta: Ombak.

Mukhtie, Fadjar. *Pemilu dan Demokrasi*. Jakarta Timur: Griya Kreasi.